

**ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PANDUAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN
2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI KONSEP MAQASHID SYARIAH**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi
Strata I Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

TIYAS PUJI LESTARI

NIM: C.100.170.131

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and some loops.

(Syalfudin Zuhdi, S.HI., M.HI)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Agustus 2021

Dewan Penguji :

Ketua : Syaifuddin Zuhdi, S.Hi., M.Hi

(......)

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum

(..........)

Anggota : Wardah Yuspin, S.H. M.Kn., P.Hd.

(..........)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta





Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang Pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang Pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Juli 2021

Penulis



Tiyas Puji Lestari
C.100.170.131

**ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PANDUAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN
2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI
COVID-19 DITINJAU DARI KONSEP MAQASHID SYARIAH**

Abstrak

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum Pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan *Sars-Cov-2*. *Corona virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat yang dapat menginveksi siapa saja baik lewat udara maupun kontak fisik. Adanya wabah ini turut berdampak pada pendidikan nasional sehinggalah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama oleh empat kementerian mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dan membedah isi dari Surat Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaran pembelajaran yang di sinkronkan dengan konsep *Maqashid Syari'ah*. Surat Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaran pembelajaran sebagai bentuk ikhtiar dalam bentuk kebijakan adalah yang paling mudah ditaati oleh publik karena jelas dan tertulis. Kebijakan pada intinya merupakan keputusankeputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik. Semua kebijakan pemerintah yang telah dibuat belum tentu sudah di implementasikan dengan baik. Maka perlu dilakukan adanya peninjauan terhadap Surat Keputusan Bersama tersebut dengan menggunakan *Maqashid Syariah* untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia.

Kata kunci: *Coronavirus Disease*, Surat Keputusan Bersama, *Maqashid Syariah*

Abstract

Corona virus disease 2019 (COVID-19) is a new type of disease that has never been previously identified in humans. The virus that causes illness ranging from mild to severe symptoms that can infect anyone, either through air or physical contact. The existence of this epidemic also had impact on national education so that a Joint Decree was issued by four ministries regarding guidelines for the implementation of learning. This study uses a normative legal approach. In this study, the author will analyze and dissect the contents of the Joint Decree on Learning Guidelines that are synchronized with the Maqashid Sharia concept. The Joint Decree on

Learning Implementation Guide as a form of endeavor in the form of a policy is the easiest for the public to comply with because it is clear and written. Policies are essentially decisions or choices of action that directly regulate management and distribution of natural, financial and human resources in the public interest. All government policies that have been made are not necessarily implemented properly. It is necessary to review the Joint Decree by using Maqashid Sharia to realize and maintain the benefit of mankind.

Key words: Coronavirus Disease, Joint Decision, Maqashid Sharia

1. PENDAHULUAN

wabah penyakit menular adalah kejadian atau peristiwa berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.¹ saat ini dunia telah diguncang dengan virus baru yang penyebarannya sangat cepat keseluruh negara didunia. virus yang pertama kali pecah di daerah Wuhan, Tiongkok ini hingga sekarang masih ada keberadaannya bahkan semakin hari muncul berbagai varian. oleh sebab itu perlu juga diperketat lagi masalah protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat. Indonesia juga tak luput dari peristiwa penularan penyakit ini, secara luas wabah yang disebabkan oleh munculnya satu jenis penyakit menular baru yang disebut dengan *Corona virus* 2019. *Corona virus* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum Pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan *Sars-Cov-2*.²

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona menyebar luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Pada awal kemunculan virus ini di Indonesia sekitar bulan Desember tahun 2019 pemerintah dengan tegas mengumumkan perintah untuk *Lock Down* pada seluruh daerah. berlanjut pada aturan kebiasaan baru yaitu harus rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak atau

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan, pasal 1 angka 1

² Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Journal Publicuho Vol.3. No.2 (Mei-Juli, 2020), Hal.268

tidak berkerumun, dan mengurangi mobiltas. Contoh konkritnya pada penelitian kali ini adalah Surat Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Covid-19 yang khusus membahas aturan-aturan apa saja yang harus dipatuhi oleh satuan pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan dimasa pandemi.

Kebijakan tersebut haruslah sejalan dengan demokrasi dan keadilan bagi masyarakat sehingga banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan agar tidak tumpang tindih dan tidak merugikan. Semua kebijakan pemerintah yang telah dibuat belum tentu sempurna dan sudah di implementasikan dengan baik. Maka perlu dilakukan adanya peninjauan terhadap kebijakankebijakan tersebut salah satunya dalah dengan menggunakan *Maqashid Syariah*. Adapun ruh dari konsep *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan.³

Secara terperinci, *Maqashid Syariah* terdiri dari penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan, penjagaan harta hingga penjagaan akal. *Maqashid Syariah* merupakan panduan seseorang untuk mencapai kemaslahatan serta menjauhi kerusakan dalam kehidupannya. Sangat sepakat jika wabah *Covid-19* sekarang ini merupakan bagian dari kerusakan yang tengah terjadi didunia ini. Tanpa bermaksud mengucilkan, *Corona virus* tersebut telah mengubah drastis kehidupan normal masyarakat dunia. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam menghadapi *Covid-19* ini. Dari sisi penjagaan agama, bagi yang sehat kita diminta untuk lebih dekat kepada Allah SWT dan meningkatkan ibadah kepada-Nya terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, dimana harus lebih banyak dirumah. Salah satu pertimbangan dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah penggunaan kaidah '*al-dararu yuzalu*' atau menghilangkan bahaya. Dalam hal ini, bahaya yang dimaksud adalah bahaya penularan *Covid-19* yang terjadi dari manusia ke manusia.⁴

³ Musolli, *Maqashid Syariah:Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*,Universita Nurul Jadid Paiton Probolinggo, *At-Turas* volume V No.1 (JanuariJuni,2018), Hal. 62

⁴ Mohamad Deny Irawan, *Refleksi Maqashid Syariah dalam Penanganan Wabah Covid19*,Gontornews.com, diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 21.30 WIB

Terkait dengan Surat keputusan Bersama yang dibuat oleh empat (4) Kementrian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ maka akan dianalisis menggunakan Konsep *Maqashid Syari'ah* khususnya pada Konsep Menjaga Agama, Menjaga Akal dan Menjaga Jiwa.

Di khususkan demikian karena substansi dari Surat Keputusan Bersama yang dianalisis lebih banyak mengarah kepada bagaimana jiwa (keselamatan dan kesehatan masyarakat) dijaga agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19, tidak lagi menambah jumlah kasus positif COVID-19. Juga menjaga akal, dalam artian pendidikan di Indonesia harus tetap berjalan demi mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun terhalang wabah. Dan satu lagi yaitu menjaga agama, dimana pelaksanaan ibadah di tempat umum maupun Sekolah dan perguruan tinggi berbasis islam harus memenuhi protokol yang ada.

2. METODE

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah atau dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah yang dipergunakan.⁵

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk memecahkan masalah dengan melakukan Kajian terhadap studi dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif dengan cara menjelaskan data-data yang ada dengan sebuah pernyataan dan bukan dengan angka.⁶

Upaya memperoleh data sekunder tersebut dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang kemudian diteruskan dengan melakukan analisis

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hal.3

⁶ Idtesis, 2013, Pengertian Penelitian Hukum Normatif, <https://www.idtesis.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 20.44 WIB

terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang kurang atau tidak memperoleh hak pendidikan dimana menjadi sumber utama dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sebagaimana Tercantum Dalam SKB Panduan Pembelajaran TA

2020/2021 Pada Masa Pandemi COVID-19

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan adalah:

“.....usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”⁷

Pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perencanaan sistematis seperti upaya pengajaran dan pelatihan dimana bertujuan untuk mendewasakan manusia, dalam artian melakukan pengubahan kearah yang lebih baik dalam hal spiritual, kepribadian, keterampilan dan kemasyarakatan.⁸

Sedangkan mengenai kebijakan pendidikan dapat diartikan dalam 2 arti yaitu yang *pertama*, kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik yaitu bermakna setiap orang atau masyarakat ikut serta dalam proses berjalannya pendidikan karena memang sudah menjadi urusan semua orang (publik) ditambah dengan hak setiap warga negara tanpa terkecuali untuk bisa memperoleh pendidikan dan pengajaran pendidikan serta pemerintah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarannya. Kemudian yang *kedua* yaitu kebijakan pendidikan itu sendiri yang dapat diartikan sebagai peran pemerintah untuk membentuk pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pada sistem nilai dan beberapa faktor situasional. Juga sebagai solusi atas permasalahan-

⁷ UU No. 20 tahun 2003, 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78

⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 23.18 WIB

permasalahan pendidikan yang muncul dalam masyarakat. sebagai pedoman bertindak yang baik agar dapat membentuk masyarakat Indonesia yang sopan, santun, dan cinta tanah air.⁹

Pemerintah dalam menanggapi adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) ada banyak hal yang dilakukan dan juga diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. . Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan ataupun peraturan. Khusus dalam aspek pendidikan nasional, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri secara bersama membuat Surat Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Covid-19.

Secara garis besar Surat Keputusan Bersama tersebut berisis mengenai beberapa hal terkait pelaksanaan pembelajaran untuk satuan pendidikan serta lingkungan dan warga satuan pendidikan. Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan salah satu bentuk konkrit dari kebijakan pemerintah untuk pendidikan nasional yang terpaksa mengalami hambatan sebagai dampak dari adanya pandemi sekarang ini. pemerintah melakukan usaha berupa penyesuaian terhadap aturan yang ada untuk menguatkan peran pemerintah yang lebih khusus pada tingkat daerah ataupun wilayah juga kantor kementerian agama sebagai pemerintah yang bisa dibilang lebih dekat dengan masyarakat dan dirasa paling mengerti apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi seperti sekarang ini. Kondisi masyarakat, kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakat tentunya harus sesuai juga dengan kapasitas daerah yang dimiliki.¹⁰

Penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan terlebih dahulu evaluasi bersama oleh para kepala daerah beserta kementerian dan lembaga yang terkait serta juga dengan para pemangku kepentingan dibidang pendidikan dengan pertimbangan bahwa pembelajaran tatap muka juga

⁹ Arwildayanto, dkk,2018,Analisis kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif), cv cendekia Press,Hal. 10-14

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2020,*Pemerintah Daerah Berikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka*.diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id> pada tanggal 6 April 2021 pukul 13.07 WIB

tetap perlu dilakukan karena mengingat dimasa pandemi pembelajaran hanya bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan pembelajaran jarak jauh pun ketika dilakukan terlalu lama akan berdampak negatif bagi peserta didik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang mempertimbangkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan serta keselamatan kepada seluruh warga satuan pendidikan yang terdiri dari peserta didik dan tenaga kependidikan dari resiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan.¹¹

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 33 tahun 2019 ditegaskan bahwa tujuan dari diselenggarakannya SPAB yaitu antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi resiko bencana
- b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana
- c) Memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari dampak bencana di satuan pendidikan Memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana
- d) Memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik resiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan
- e) Memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan
- f) Membangun kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program SPAB

Berdasarkan pemetaan daerah dengan resiko penyebaran virus corona dari tertinggi hingga terendah maka dibedakan kedalam empat zona yaitu zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Untuk daerah yang masih

¹¹ Permendikbud no 33/2019 hal. 4

dinyatakan pada zona merah dan oranye maka masih dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan dengan zona yang sudah dinyatakan dengan zona kuning dan hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka, akan tetapi harus dilakukan secara bertahap dan tidak bisa langsung teraksana secara serentak karena setiap perkembangan daerah tetap diadakan pemantauan apabila dalam perjalanan melakukan pembelajaran tatap muka muncul kasus baru positif corona.

Penyesuaian zonasi tersebut pun berdasarkan Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran mengalami perubahan dari SKB sebelumnya. Pada SKB sebelumnya untuk pembelajaran tatap muka hanya bisa dilakukan pada daerah dengan zona hijau saja, namun setelah ada perubahan pembelajaran tatap muka juga dapat dilaksanakan pada daerah zona kuning.¹² Adanya perluasan pembelajaran tatap muka pada zona kuning juga didasari atas munculnya kendala-kendala dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu sulitnya tenaga pendidik dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, kurangnya pendampingan orang tua terhadap peserta didik, juga sampai pada jenuhnya para peserta didik dan kurangnya konsentrasi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh.¹³ Tak hanya itu saja, pada lampiran SKB penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 juga dijelaskan untuk kendala yang dihadapi oleh semua pihak terkait berlangsungnya pembelajaran pada masa pandemi.

Untuk Sekolah kejuruan atau perguruan tinggi yang melakukan pembelajaran praktik, untuk semua zona dapat melakukan pembelajaran tersebut dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan untuk madrasah atau Sekolah keagamaan dengan asrama khusus pada daerah dengan status zona kuning dan hijau pembukaannya dilakukan secara bertahap dan juga harus memperhatikan kapasitas asrama. Untuk yang memiliki kapasitas kurang dari seratus (<100) asrama maka pembukaannya dibagi menjadi 2 pada masa transisi yaitu satu bulan pertama dibuka lima puluh persen (50%) dan pada bulan kedua dapat dibuka sepenuhnya atau seratus persen (100%). Lalu untuk yang

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, diakses pada <https://www.kemdikbud.go.id> pada tanggal 7 April 2021 pukul 20.27 WIB

¹³ Ibid

memiliki kapasitas asrama lebih dari seratus (>100) maka pada masa transisi untuk bulan pertama hanya boleh dibuka dua puluh lima persen (25%) dan bulan kedua lima puluh persen (50%).

Pembelajaran tatap muka pada zona kuning dan hijau dapat terlaksana apabila pemerintah daerah dan kantor wilayah atau kantor kementerian agama memberikan izin, juga pada satuan pendidikan harus terlebih dahulu memenuhi semua daftar periksa dan juga persetujuan dari orang tua sangat diperlukan. Hal yang menjadi fokus dalam kebijakan baru pada SKB yang telah diperbarui adalah perluasan pembelajaran tatap muka pada zona kuning dan adanya kurikulum darurat yang khusus digunakan dalam kondisi tertentu. Kurikulum darurat adalah kurikulum yang digunakan pada masa-masa darurat seperti pada masa pandemi sekarang ini. Dan kurikulum ini bentuk penyederhanaan dari kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum yang sedang dipakai sekarang ini yaitu kurikulum 2013.¹⁴

Tujuan dari adanya kurikulum darurat ini adalah untuk mengurangi beban guru atau tenaga pendidik dalam menjalankan pembelajaran serta dalam menentukan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Juga pada kurikulum darurat ini berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk syarat kelanjutan pembelajaran ditingkat selanjutnya. Namun penggunaan kurikulum darurat ini tidak wajib digunakan, dimana setiap satuan pendidikan diberikan tiga (3) opsi atau pilihan diantaranya yaitu pertama, tetap menggunakan kurikulum 2013, atau yang kedua, menggunakan kurikulum darurat (dalam kondisi khusus), dan yang ketiga melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri oleh masing-masing satuan pendidikan.¹⁵

Sistem pembelajaran dimasa pandemi tidak bisa disamakan dengan sistem pembelajaran yang dilakukan sebelum pandemi, terutama terkait waktu atau jam pelajaran. Pemerintah melakukan relaksasi peraturan untuk guru dimana guru diberikan kebebasan dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik dan tidak lagi dituntut selama 24 jam dalam satu minggu. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan

Dalam Kondisi Khusus bagian huruf B tentang tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus yang berbunyi:

“pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik”

Perihal tercapainya kesuksesan pembelajaran di masa pandemi, maka sangat diperlukan kerjasama yang baik dari banyak pihak pula, tidak sekedar satuan pendidikan dan peserta didiknya saja yang berupaya namun pihak-pihak lain juga harus andil seperti orang tua yang mempunyai peran untuk ikut mendampingi peserta didik atau anak untuk melakukan pembelajaran di rumah agar anak tidak mengalami kebingungan dalam belajar lalu juga ada pihak Sekolah untuk menyediakan fasilitas belajar dan mengajar yang paling efektif digunakan untuk pembelajaran pada masa pandemi. Dan Pemerintah sebagai unsur yang paling utama dalam menentukan kebijakan bagi seluruh elemen terkait pembelajarannya di masa pandemi, haruslah memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi.

b. Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran TA 2020/2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 ditinjau dari konsep *Maqashid Syari'ah*

Dalam hukum biasa atau hukum yang dibuat oleh negara (hukum positif) hanya akan mengatur hubungan antar sesama manusia atau dalam islam disebut *Hablumminannas*. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan tak bisa begitu saja manusia melupakan aturan hubungannya dengan Tuhan (*Hablumminallah*). Tujuan dibentuknya dari sebuah hukum adalah memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat, melindungi hak masyarakat dan menghukum pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Namun seperti kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa setiap keputusan ataupun ketetapan dari pengadilan tidak semua menunjukkan keadilan bagi masyarakat.

Hukum islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Walaupun dinamakan hukum islam, bukan tidak mungkin peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak dapat dikorelasikan kedalamnya. Dalam Surat Keputusan Bersama Panduan

Pembelajaran di Masa Pandemi tersebut ada beberapa poin yang dapat dikaitkan atau dikorelasikan dengan konsep *Maqashid Syari'ah*. Penggunaan *Maqashid Syari'ah* dalam menganalisis Surat Keputusan Bersama tersebut tentulah tidak akan menyalahi ideologi bangsa Indonesia. Justru malah akan terefleksikan kemaslahatan umum atau yang dikenal juga dengan *Maqashid Syari'ah* itu tadi. Bahkan Pancasila yang merupakan dasar negara jika diuraikan lebih lanjut maka akan terlihat nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* yang ada didalamnya.¹⁴

Maqashid Syari'ah dapat diartikan menjadi mengambil jalan tengah dalam menyikapi berbagai masalah yang muncul ataupun dalam mengaplikasikan berbagai hal agar tidak terlalu berlebihan juga tidak kurang sebab sebuah kemaslahatan akan terwujud apabila mengacu pada wahyu dan bukan semata-mata hasil pemikiran seseorang yang tak berdasar.¹⁵ Walaupun kita sadari bahwa munculnya *Maqashid* sebagai sebuah Hukum tak lepas dari pemikiran-pemikiran para mujtahid. Hal itu tak lain dan tak bukan merupakan dilakukan untuk mengetahui tujuan-tujuan akhir dari hukum Tuhan seperti yang terdapat pada kitab suci Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Asy-Syatibi merumuskan lima hal yang mendasari kemaslahatan tersebut diantaranya yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nashl*) dan memelihara harta kekayaan (*hifzh al-mal*).¹⁶ Untuk yang pertama yaitu memelihara agama (*hifzh addin*). Agama sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam agama terdapat kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang tentunya digunakan sebagai pedoman manusia untuk menjalankan hubungannya dengan sang pencipta Allah SWT dan juga hubungan sesamanya. Wajib hukumnya bagi setiap umat islama untuk menaati perintah Allah SWT seperti yang terdapat dalam rukun islam terutamanya menegakan sholat. Dengan sholat yang baik maka akan menjamin kemaslahatan didunia dan di akhirat.¹⁷

¹⁴ Muhlil Musolin, 2020, Nilai *Maqashid Syari'ah* Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republic Indonesia, Dialog Vol. 43 No. 1 Juni 2020, Hal. 69

¹⁵ Busyro, 2019, *Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, Hal. 12

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Filsafat Hukum Islam*, hal. 245

¹⁷ Afridawati, 2015, Stratifikasi Al-*Maqashid Al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah, Jurnal Al-Qishthu, Vol. 13 nomer 1, Hal. 20-21

Berikutnya yaitu memelihara akal (*hifzh al-'aql*), sebagai manusia kita tahu bahwa kita memiliki karunia yang sangat luar biasa yaitu berupa akal. Sedangkan makhluk hidup lainnya tak diberikan karunia tersebut. Oleh sebab itu sebagai manusia harus dapat menjaga akal yang dimiliki dengan cara mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menjauhkan dari hal-hal yang dapat merusak akal contohnya adalah qamr, tidak melakukan kegiatan yang negatif.¹⁸ Selanjutnya memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*). Disaat seperti sekarang ini dimana wabah penyakit menjalar kemana-mana, sudah wajib dan seharusnya kita menjaga diri dan keluarga serta orang sekitar dari wabah penyakit tersebut. Dalam ajaran agama islam pun tentunya sudah banyak surat-surat yang memerintahkan hal tersebut. Karena manusia diwajibkan untuk tetap berusaha dalam keadaan apapun dan bukan hanya pasrah menerima setiap ketentuan dari Allah SWT.

Lalu ada memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), islam mengharamkan zina dan menghalalkan atau menganjurkan pernikahan dengan maksud mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir menurut Asy-Syatibi adalah menjaga atau memelihara harta (*hifzh al-mal*), walaupun harta bukan yang paling utama namun keberadaannya juga diperukan manusia dalam mempertahankan hidupnya maupun beribadah. oleh sebab itu syari'at juga menganjurkan umat islam untuk berusaha dan menjaga harta yang dipunya. tak lupa juga untuk selalu menyedekahkan hartanya di jalan Allah. usaha untuk memperoleh harta juga haruslah dengan cara halal, maka mencuri, menipu ataupun hal-hal lain yang merugikan orang lain diharamkan untuk memperoleh harta.¹⁹

Dalam analisis kali ini, penulis akan memfokuskan pada tiga (3) konsep yang ada pada *Maqashid Syari'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga akal. Pertama pembahasan mengenai **menjaga agama**, dalam Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi substansinya tak luput dari menjaga agama. Pertama pada tempat ibadah yang ada di satuan pendidikan ataupun pada satuan pendidikan keagamaan baik yang dengan asrama ataupun tidak dengan asrama diberikan beberapa protokol kesehatan yang harus dijalankan yaitu mulai

¹⁸ Ibid, Hal. 21

¹⁹ ibid, Hal. 22

dari membiasakan mencuci tangan pakai sabun, tidak saling meminjam peralatan ibadah, selalu menjaga jarak ketika beribadah dan tidak saling bersentuhan satu sama lain, serta selalu memakai masker.

Yang menjadi semakin berbeda dalam ketentuan ynag baru ini adalah dalam hal menjaga jarak. untuk tetap menjaga kesehatan bersama sekaligus menjaga agama dengan tetap beribadah dibolehkannya sholat dengan shaf yang tidak rapat. Keputusan atau fatwa ini oleh para *ulul amri* (ulama dan umara) didasarkan atas firman Allah SWT serta beberapa dalil terkait, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya:

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan ulul amri diantara kamu” (Q.S. An-Nisa:59)

Dalam potongan ayat tersebut sudah jelas ditegaskan untuk kita sebagai umat muslim senantiasa menaati perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW dan apabila dalam beberapa hal yang mengharuskan adanya sebuah instruksi dari para pemimpin negeri maka lebih baik dilakukan karena itu termasuk dalam hal mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar.²⁰

Namun di beberapa kelompok masyarakat tertentu belum ada kesamaan pendapat, masih ada masyarakat yang menganggap bahwa sholat dengan shaf yang renggang sama saja sholatnya tidak sah ada juga yang mengatakan bahwa hal demikian sama saja sholat sendiri-sendiri. Kelompok masyarakat ataupun ulama yang tidak sepakat dengan berjaraknya sholat dan menganggap bahwa sholat dengan shaf yang lurus adalah lebih afdhal. Sedangkan untuk mereka yang menyepakati adanya jarak dalam shaf sholat dikarenakan adanya suatu uzur, dimana dengan adanya uzur tersebut apabila tetap dilanggar akan memungkinkan terjadinya mudharat yang lebih besar lagi.

Kedua **menjaga jiwa**, dimasa sekarang ini paling utama untuk dilindungi adalah jiwa atau kesehatan setiap manusia. COVID-19 ini dapat timbul di klaster-klaster yang dihadiri banyak orang atau kerumunan seperti Sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat wisata, kegiatan warga seperti hajatan dan tempat-

²⁰ Eko Misbahudin Hasibuan dan Muhammad Yusran, Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah COVID-19, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 2 (2020), Hal. 115

tempat ataupun kegiatan berkerumun lainnya. Pada Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi usaha pemerintah dalam rangka menjaga masyarakat khususnya peserta didik satuan pendidikan adalah dengan menambahkan kebijakan protokol kesehatan tentunya pada setiap kegiatan hingga tata ruang setia kelas. Kemudian pemerintah melakukan pembatasan hingga penutupan tempat-tempat tersebut hingga dilakukan *lock down* baik daerah maupun nasional. Sembari menunggu vaksin yang disiapkan oleh pemerintah masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan.

Pada Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi usaha pemerintah dalam rangka menjaga masyarakat khususnya peserta didik satuan pendidikan adalah dengan menambahkan kebijakan protokol kesehatan tentunya pada setiap kegiatan hingga tata ruang setia kelas. Akan tetapi walaupun sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan, satuan pendidikan yang boleh dibuka hanya yang ada di daerah dengan status zona hijau dan kuning. Sedangkan untuk daerah dengan status zona merah dan oranye tidak di ijinakan membuka satuan pendidikan dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring.

Beberapa aturan yang dibuat untuk satuan pendidikan dalam rangka menjaga kesehatan para peserta didiknya yaitu antara lai:

- a) Kondisi kelas di setting yaitu berjarak 1,5 (satu koma lima) meter antar peserta didik serta diabatasi jumlah setiap satu kelasnya.
- b) Apabila sudah melakukan pembelajaran tatap muka maka untuk jumlah hari pertemuan setiap minggunya juga dibatasi tergantung kebijakan masing-masing satuan pendidikan.
- c) Setiap warga satuan pendidikan tanpa terkecuali wajib berperilaku menggunakan masker, CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik
- d) Menerapkan etika batuk/bersin
- e) Peserta didik disarankan untuk membawa bekal masing-masing dari rumah

- f) Seluruh warga satuan pendidikan dan keluarganya harus dalam kondisi sehat, apabila mengidap penyakit penyerta maka harus dalam kondisi terkontrol.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang juga menjelaskan turunnya suatu wabah penyakit juga dilengkapi dengan dalil yang menjelaskan kepada manusia dalam menghadapi suatu wabah penyakit. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya:

“tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diridiri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah SWT. Sesungguhnya hal

itu mudah bagi Allah SWT” (Q.S. Al-Hadid:22)

Terdapat satu dalil yang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengenai solusi ketika bencana wabah menjangkiti suatu daerah, yaitu:

“jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah ditempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.”(H.R. Bukhari)

Seperti pada kebijakan *lock down* oleh pemerintah, bahwasannya pembatasan sosial berskala besar terpaksa harus dilakukan demi menjaga banyaknya mobilitas masyarakat yang apabila tidak dibatasi akan semakin memperburuk keadaan wilayah dengan bertambahnya kasus COVID-19. Dalil tersebut sangat relevan ketika diterapkan, dan hasilnya pun juga cukup bagus untuk menangani wabah penyakit saat ini.

ketiga **menjaga akal**, pendidikan sebagai salah satu dampak dari adanya COVID-19 menjadi sangat diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, karena pendidikan sebagai tonggak utama bagi keberlangsungan negara nantinya. Dengan adanya wabah seperti sekarang ini tak bisa dipungkiri jika pendidikan mulai menurun. Dari yang awalnya Sekolah ditutup untuk sementara hingga saat ini yang menggunakan sistem jaringan internet untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

Jika membahas kegiatan belajar mengajar yang menggunakan jaringan internet, hal tersebut termasuk usaha pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi. Tentunya tidak

semua zona, hanya untuk daerah dengan zona oranye dan merah saja yang diharuskan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring (dalam jaringan). Sedangkan untuk daerah dengan zona kuning dan hijau tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka akan tetapi pembatasan jumlah hari dan jumlah siswa setiap kelasnya juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan klaster baru.

Secara gamblang memang aturan untuk pembelajaran jarak jauh tidak tercantum dalam syariat, akan tetapi bukan berarti usaha tersebut tidak diperbolehkan secara hukum islam. Secara syariat menjaga akal biasanya dimaksudkan pada menjaga sistem syaraf utama dari kemudharatan seperti adanya larangan mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang karena dapat merusak tubuh. Akan tetapi kali ini dalam hal menjaga akal sebagaimana usahanya berupa pencerdasan anak-anak bangsa melalui pendidikan terpaksa harus terkendala wabah virus penyakit.

kebijakan tersebut ada dan dibuat karena adanya suatu keadaan yang mendesak yaitu apabila satuan pendidikan ditutup maka pendidikan bagi masyarakat tidak ada dan dampaknya adalah jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa yaitu kebodohan. Padahal jelas dalam Al-Quran menyeru umat islam untuk menuntut ilmu, seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Alaq yat 1-5 yang artinya:

“(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3) bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah (4) yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (5) Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui”
(Q.S. Al-Alaq:1-5)

Juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

“menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”
(H.R. Ibnu Majah)

Jelas dalam ayat dan hadits tersebut bahwa menuntut ilmu wajib hukumnya bagi umat manusia. Dalam islam juga tidak diberikan syarat khusus media apa yang harus digunakan dalam mentransfer ilmu kepada para peserta didik. Selama media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat maka sah-sah saja hukumnya.

Seorang ahli pendidikan islam Mohammad Athiyah Al-Abrasy mentakrifkan metode mengajar yaitu *“ia adalah jalan yang kita ikuti untuk memberi faham kepada murid-murid segala macam pelajaran, dalam segala macam mata pelajaran. Ia adalah rencana yang kita buat untuk diri kita sebelum kita memasuki kelas, dan kita terapkan dalam kelas itu sesudah kita memasukinya”*.²¹ kelas tidak harus yang berbentuk ruangan dengan dinding pemisah, akan tetapi media online seperti berbagai macam aplikasi seperti *Google Meet, Zoom, Google Classroom, Schoology, WhatsApp* dan aplikasi lainnya juga termasuk “kelas” untuk pembelajaran jarak jauh seperti pada masa pandemi seperti sekarang ini. Karena yang dititik beratkan adalah pada pemberian ilmu kepada para peserta didik dan juga metode yang tidak merugikan masyarakat.

Melihat kembali keatas bahwa tujuan dari menjaga akal dalam Maqashid Syariah adalah agar manusia senantiasa dapat terus berprogres dalam menjalani kehidupan sehari-hari, maka apa yang telah dilakukan pemerintah sebagai upaya tetap menjaga pendidikan nasional di Indonesia adalah berbanding lurus dengan Maqashid Syariah khususnya menjaga akal. Dialihkannya sistem pembelajaran dari tatap muka kepada sistem pembelajaran dalam jaringan adalah sama-sama memberikan edukasi dan bukan bermaksud untuk memundurkan pendidikan nasional. Apalagi dilatarbelakangi oleh adanya sebuah bencana berupa wabah penyakit yang dapat menular apabila kerumunan-kerumunan tetap dibiarkan, tidak adanya jaga jarak antar personal.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka yang dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu bahwa adanya *Maqashid Syariah* sebagai tujuan hukum islam adalah sebagai tameng bagi manusia agar senantiasa terhindar dari kemudharatan duniawi yang mungkin saja bisa terjadi akibat dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam syariat islam. Dan yang paling utama dari tujuan hukum islam sendiri adalah untuk memberikan kemaslahatan pada umat manusia baik kemaslahatan didunia berupa terhindarnya dari berbagai ha-

²¹ Alfiah, Hadist Tarbawi (Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadist Nabi), (Pekanbaru: Publishing and Consulting Company, 2015), Hal. 132

hal yang merusak jiwa, akal, keturunan, harta bahkan agama juga kemaslahatan di akhirat berupa ganjaran yang pantas sesuai apa yang sudah dilakukan manusia didunia. Kemaslahatan berupa surga bagi mereka yang senantiasa mematuhi aturan-aturan Allah SWT baik yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat islam yang banyak dan mendominasi, hukum islam adalah sebagai patokan juga disamping hukum positif. Secara general banyak ulama maupun ahli agama yang menggunakan Maqashid Syariah dalam menganalisis peraturan-peraturan pemerintah. Terlebih juga untuk peraturan yang ada kaitannya dengan masalah ibadah ataupun muamalah dalam agama islam. Oleh sebabnya hukum islam hadir untuk memberikan pemahaman juga bagi masyarakat bahwa apa yang diperintahkan oleh pemerintah belum tentu mengancam keimanan masyarakat, justru dari adanya sebuah peraturan dapat memberikan manfaat dan kebaikan disisi lain bagi masyarakat itu sendiri.

Seperti peraturan dalam Surat Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Covid-19 tersebut, bahwasannya peraturan-peraturan yang tertuang dalam SKB diatas setelah dianalisis dengan Maqashid Syariah khususnya dalam hal menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga akal keseluruhannya tidaklah menyalahi syariat yang ada. Analisis diatas tentunya sejalan dengan menjaga Maqashid Syariah, sebagai ikhtiar pemerintah untuk tetap melakukan pencerdasan bagi bangsa dan menjaga pendidikan nasional tetap berjalan.

PERSANTUNAN

Tak ada kata yang bisa menggambarkan rasa terimakasih seorang anak kepada orang tuanya kecuali keberhasilan anak dari hasil peluh-peluh perjuangan orang tuanya. kepada almarhum bapak, saya ucapkan maaf karena tidak bisa membuat bapak melihat akhir ini secara langsung dan terimakasih banyak telah berkorban demi anakmu ini. dan terimakasih juga untuk ibuk sudah mnendorong sejauh ini dalam bait-bait doa yang engkau panjatkan.

terimakasih untuk Almamater tercinta yang sudah ditakdirkan Allah untuk saya berproses dan berjuang demi mendekatkan diri dengan kesuksesan.

Juga untuk Bapak Syaifudin Zuhdi, S.Hi., M.Hi selaku dosen pembimbing saya ucapkan terimakasih banyak atas bimbingannya selama ini

Tak lupa juga ucapan terimakasih ini saya ucapkan kepada teman-teman ikatan yang selalu memberikan dukungan kepada saya, memberikan saya rumah kedua untuk berproses, berteduh, mengadu, dan berangan bersama. semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati.2015.*Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*.Jurnal Al-Qishthu.Vol. 13 nomer 1
- Ahmad, Beni Saebani.2008. *Filsafat Hukum Islam*
- Alfiah.2015.*Hadist Tarbawi (Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadist Nabi)*.Pekanbaru:Publishing and Consulting Company
- Arwildayanto, dkk.2018.*Analisis kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*.cv cendekia Press
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,2016,KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id> ,diakses pada tanggal 29 November 2020 pukul 23.18 WIB
- Busyro.2019,*Maqashid Al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*
- Deny, Mohamad Irawan.*Refleksi Maqashid Syariah dalam Penanganan Wabah Covid-19*. Gontornews.com.diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 21.30 WIB
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim.2018.*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.Depok:Prenadamedia Group
- Idtesis.2013.*Pengertian Penelitian Hukum Normatif*.<https://www.idtesis.com> .diakses pada 28 maret 2021
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*Pemerintah Daerah Berikan Kewenangan Penuh Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka*.diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id> pada tanggal 6 April 2021 pukul 13.07 WIB

- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia-Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ-Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Misbahudin,Eko Hasibuan dan Muhammad Yusran.2020.*Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah COVID-19*.Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol. 1. No. 2
- Musolli, 2018, *Maqashid Syari'ah:Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer*, Probolinggo: Universita Nurul Jadid Paiton Probolinggo
- Musollin, Muhlil.*Nilai Maqashid Syari'ah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*.2020.Dialog Vol. 43 No. 1 Juni 2020
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan, pasal 1 angka 1
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 33 tahun 2019 Tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana
- Tuwu, Darwin.2020.*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19*.Journal Publicuho
- UU No. 20 tahun 2003,2003,Lembaran Negara Republik Indonesia No.

Filename: 5ba9-663d-fefe-761a
Directory: C:\Users\user\AppData\Local\Temp
Template: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templa
tes\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: user
Keywords:
Comments:
Creation Date: 7/30/2021 9:16:00 PM
Change Number: 14
Last Saved On: 10/27/2021 7:34:00 AM
Last Saved By: user
Total Editing Time: 259 Minutes
Last Printed On: 10/27/2021 7:42:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 25
Number of Words: 5,712 (approx.)
Number of Characters: 37,476 (approx.)